

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Berencana (DP3KB) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;

- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit;
- e) Pembiayaan;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang

- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
 28. Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
 29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 058 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 045 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017.

1.3. **SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
-------	-------------

	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan -LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Pajak				
2	Pajak				
3	Retribusi				
4	Retribusidll				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp..... dari target yang ditetapkan Rp..... atau%.
2. Realisasi pendapatan lebih/(kurang) dari anggaran disebabkan

(jelaskan alasan jika realisasi kurang dari target/anggaran, untuk keperluan menjawab pertanyaan **Evaluasi Gubernur**)

b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Belanja Pegawai	4.346.279.000,0 0	4.102.552.531,0 0	(243.726.469,00)	94.39
2	Belanja Barang dan Jasa	10.058.105.000,0 00	9.064.748.754,0 0	(993.356.246,00)	90.12
3	Belanja Modal	1.049.426.000,0 0	884.778.976,00	(164.647.024,00)	84.31
	Jumlah	15.453.810.000,0 00	14.052.080.261,0 00	(1,401,729,739,0 0)	90.93

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.102.552.531,00 dari target yang ditetapkan Rp.4.346.279.000,00 atau 94.39%.
2. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 9.064.748.754,00 dari target yang ditetapkan Rp 10.058.105.000,00 atau 90.12.%.
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 884.778.976,00 dari target yang ditetapkan Rp 1.049.426.000,00 atau 84.31%.

Secara keseluruhan total realisasi belanja mencapai 90.93 % dari total yang dianggarkan. Adapun belum maksimalnya total realisasi belanja salah satu penyebabnya dari realisasi belanja modal, hal ini dikarenakan sistem lelang pada belanja modal dimana pemenang lelang menetapkan harga lelang jauh dibawah total anggaran belanja modal sehingga mempengaruhi realisasi belanja keseluruhan.

1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
3. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
4. Anggaran yang tidak terserap sebagian besar bersumber pada kegiatan operasional di Balai Penyuluhan tingkat kecamatan yang mana seluruh pengeluaran riil menyesuaikan kebutuhan Balai Penyuluhan dan fenomena yang ada pengeluaran ditingkat Balai Penyuluhan pada tahun 2018 relative sedikit.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD
PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh SKPD adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah				

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2017, maka realisasi pendapatan yang dikelola SKPD Tahun 2018 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. atau%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola SKPD setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp..... atau%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah				

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar% atau realisasi mencapai Rp.....

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Pajak Hotel				
Hotel Melati III				
Hotel Melati II				
Hotel Melati I				
Losmen				
b. Pajak Restoran				
Restoran				
Rumah Makan				
c. Pajak Hiburan				
Bioskop				
Pagelaran Seni				
Arena Bilyard				
Hiburan Insedentil				
Permainan Ketangkasan				
Pertandingan				
Kolam Renang				
d. Pajak Reklame				
Papan/Bilboard/Megatron				
Kain				
Melekat/Stiker				
Reklame Selebatan				
e. Pajak Penerangan Jalan				
f. Pajak Bahan Galian C				
Batu Pecahan				
Pasir				
Batu Belah				
g. Pajak Sarang Burung Walet				
h. Pajak Air Bawah Tanah				
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
<i>Jumlah</i>				

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola SKPD dapat terealisasi Rp..... atau% dari target sebesar Rp. sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Pelayanan Kesehatan				
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK				

d. Parkir di Tepi Jalan Umum				
e. Pelayanan Pasar				
f. Pengujian Kendaraan Bermotor				
g. Pemakain Kekayaan Daerah				
h. Tempat Pelelangan				
i. Terminal				
j. Tempat Khusus Parkir				
k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan				
l. Rumah Potong Hewan				
m. Pelayanan Kepelabuhan				
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga				
o. Penjualan Prod Usaha Daerah				
p. Penutupan Jalan				
q. Ijin Mendirikan Bangunan				
r. Ijin Gangguan /Keramaian				
s. Ijin Trayek				
t. Ijin Jasa Konstruksi				
u. Ijin penebangan pohon jati				
v. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				
w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
x. Tanda Daftar Industri (TDI)				
y. Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan				
z. Ijin Pengangkutan hasil Hutan				
Jumlah				

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp.....dari yang direncanakan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah				
PD Air Minum (PDAM)				
PD Perbengkelan				
PD Percetakan				
PD Farmasi				
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank				
PT. Bank Jateng				
PD Bank Puspakencana				
BKK Banjarharjo				
BKK Brebes				
c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga				
Dana Bergulir-Usaha Koperasi				
Dana Bergulir-Usaha Pertanian				
Dana Bergulir-Usaha Peternakan				
Dana Bergulir-Usaha Perikanan				

Jumlah				
--------	--	--	--	--

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp..... dari yang direncanakan sebesar Rp..... atau% dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan				
Penjualan Drum Bekas				
Penjualan Bongkaran Proyek				
b. Jasa Giro Kas Daerah				
c. Bunga Deposito				
Deposito pada BPD Jateng				
Deposito pada Bank Mandiri				
Deposito pada BRI				
Deposito pada Bank Bukopin				
Deposito pada BPR/BKK				
Deposito pada BTPN				
Deposito pada Bank Muamalat				
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah				
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja				
f. Penerimaan Lain-lain				
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri				
h. Penerimaan Pabrik Gula				
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah				
Jumlah				

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 14.052.080.261,00 dari anggaran Rp. 15.453.810.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Belanja Operasi (BO)	14.404.384.000,00	13.167.301.285,00	91.41	11.275.958.237,00
b. Belanja Modal (BM)	1.049.426.000,00	884.778.976,00	84.31	1.120.179.850,00
c. Belanja Tak Terduga (BTT)				

d. Belanja Transfer (BT)				
Jumlah	15.453.810.000,00	14.052.080.261,00	90.93	12.396.138.087,00

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. **13.167.301.285,00** dari anggaran sebesar Rp. **14.404.384,00** Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Belanja Pegawai	4.346.279.000,00	4.102.552.531,00	94.39	7.849.560.047,00
b. Belanja Barang dan Jasa	10.058.105.000,00	9.064.748.754,00	90.12	3.426.398.190,00
c. Belanja Bunga				
d. Belanja Subsidi				
e. Belanja Hibah				
f. Belanja Bantuan Sosial				
g. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah	14.404.384.000,00	13.167.301.285,00	91.41	11.275.958.237,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Gaji dan Tunjangan	3.110.725.000,00	2.989.757.031,00	96.11	6.628.526.047,00
b. Tambahan Penghasilan PNS	1.213.226.000,00	1.090.850.000,00	89.91	1.171.900.000,00
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah				
e. Biaya Pemungutan Retribusi				
f. Honorarium PNS				
g. Honorarium Non PNS				
h. Uang Lembur	22.328.000,00	21.945.500,00	98.29	26.054.000,00
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
k. Belanja BLUD				
l. Belanja BOS				
Jumlah	4.346.279.000,00	4.102.552.531,00	94.39	7,849,560,047,00

b.Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	799.908.350,00	695.288.567,00	86.92	287.884.063,00
b. Belanja Bahan/Material	154.233.000,00	135.621.300,00	87.93	81.629.000,00
c. Belanja Jasa Kantor	4.839.903.500,00	4.618.548.010,00	95.43	1.019.947.345,00
d. Belanja Premi Asuransi	1.344.000,00	102.808,00	7.65	1.225.732,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.114.000,00	79.555.097,00	69.72	84.395.103,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	200.868.500,00	139.951.700,00	69.67	101.720.600,00
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.700.000,00	18.900.000,00	79.75	60.650.000,00
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135.900.000,00	83.900.000,00	61.74	34.550.000,00
i. Belanja Sewa Alat Berat				
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.475.000,00	22.475.000,00	100.00	26.400.000,00
k. Belanja Makanan dan Minuman	1.164.399.000,00	1.133.159.500,00	97.32	679.422.500,00
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
m. Belanja Pakaian Kerja	12.900.000,00	12.900.000,00	100.00	3.000.000,00
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	90.440.000,00	90.040.000,00	99.56	79.198.400,00
o. Belanja Perjalanan Dinas	979.069.650,00	949.165.072,00	96.95	818.403.197,00
p. Belanja Beasiswa Tugas Belajar				
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS				
r. Belanja Perjalanan Pindah Tugas				
s. Belanja Pemulangan Pegawai				
t. Belanja Pemeliharaan	27.875.000,00	13.579.500,00	48.72	14.947.250,00
u. Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	9.009.000,00	90.09	133.025.000,00
v. Belanja BLUD				
w. Belanja Barang-Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	834.350.000,00	426.153.200,00	51.08	
x. Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli	641.400.000,00	631.305.000,00	98.42	
y. Honorarium PNS	3.675.000,00	3.675.000,00	100.00	
z. Honorarium Non PNS	1.550.000,00	1.420.000,00	91.61	
Jumlah	10.058.105.000,00	9.064.748.754,00	90.12	3.426.398.190,00

- c. Realisasi Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp. merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;
- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 sebesar Rp..... merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2018 sebesar Rp..... terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp..... dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.....

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 884.778.976 dari anggaran sebesar Rp 1.049.426.000 dengan rincian :

Belanja Modal :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. BM - Tanah				
b. BM - Peralatan & Mesin	672.826.000,00	551.279.976,00	81.93	302.306.550,00
c. BM - Gedung & Bangunan	376.600.000,00	333.499.000,00	88.56	817.040.000,00
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. BM - Aset Tetap Lainnya.				833.300,00
Jumlah	1.049.426.000,00	884.778.976,00	84.31	1.120.179.850,00

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp..... dari anggaran sebesar Rp.....

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
Belanja Tak Terduga				
Jumlah				

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. dari anggaran sebesar Rp.

Belanja Transfer :	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio %	Realisasi 2017
a. Bagi Hasil - Pajak				
b. Bagi Hasil – Retribusi				
Jumlah				

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2018 dan 2017.

Pendapatan-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO				
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	5.033.394.622,00	5.394.124.466,00	(360.729.844,00)	(6.69)
Jumlah	5.033.394.622,00	5.394.124.466,00	(360.729.844,00)	(6.69)

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO				
A. Pendapatan Pajak Daerah - LO				
B. Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
D. Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
Jumlah				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi	Kenaikan	%
--------	-----------	----------	---

	Tahun 2018	Tahun 2017	/(Penurunan)	
2. Pendapatan Transfer - LO				
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
D. Bantuan Keuangan - LO				
Jumlah				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.033.394.622,00.dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
A. Pendapatan Hibah - LO	5.033.394.622,00	5.394.124.466,00	(360.729.844,00)	(6.69)
B. Dana Darurat - LO				
C. Pendapatan Lainnya - LO				
Jumlah	5.033.394.622,00	5.394.124.466,00	(360.729.844,00)	(6.69)

A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
A. Pendapatan Hibah - LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang	5.033.394.622,00	5.394.124.466,00	(360.729.844,00)	(6.69)
Dst.....				
Jumlah	5.033.394.622	5.394.124.466	(360.729.844)	(6.69)

Penjelasan :

- a. Pendapatan Hibah berupa barang adalah sebesar Rp. 5.033.394.622, hibah yang diperoleh berupa Alat alat kontrasepsi dari Provinsi dan Kendaraan Bermotor dari kementrian PPA

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2018 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
C. Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
Dst....				
Jumlah				

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
BEBAN				
A. Beban Operasi	18.677.042.810,00	16.851.470.788 ,83	1.825.572.021,17	10.83
B. Beban Transfer				
Jumlah	18.677.042.810,00	16.851.470.788 ,83	1.825.572.021,17	10.83

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
A. BEBAN OPERASI				
1. Beban Pegawai	4.178.266.745,00	7,849.678.011,00	(3.671.411.266,00)	(46.77)
2. Beban Persediaan	7.148.233.938,00	6.290.882.549 ,00	857.351.389 ,00	13.63
3. Beban Jasa	5.348.858.883,00	1,219,380,220,00	4.129.478.663,00	338.65
4. Beban Pemeliharaan	93.134.597,00	99,342,353,00	(6.207.756,00)	(6.25)
5. Beban Perjalanan Dinas	949.165.072,00	818,403,197,00	130.761.875,00	15.98
3. Beban Bunga				
4. Beban Subsidi				
5. Beban Hibah	426.153.200,00		426.153.200,00	

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
6. Beban Bantuan Sosial				
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	533.230.375,00	573.784.458 ,83	(40.554.083,83)	(7.07)
8. Beban Penyisihan Piutang				
9. Beban Lain-lain				
Jumlah	18.677.042.810,00	16.851.470.788,83	1.825.572.021,17	10.83

Beban Pegawai sebesar Rp termasuk di dalamnya Beban Pegawai BLUD.

Rincian Beban Pegawai pada BLUD Unit Kerja adalah :

- a. Puskesmas
b. Puskesmas
c. Puskesmas
d. Puskesmas
e. Puskesmas
Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
- Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS, Dana BOS SD/SMP dipergunakan untuk pengeluaran biaya operasional sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Uraian	Kode Rek	Nama Rek	Jumlah

- Adapun rincian penggunaan Dana BOS sebagai berikut :

Rincian Penggunaan Dana BOS SD/SMP	Nilai (Rp)
Jumlah	

3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2018 sebesar Rp 426.153.200,00 merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat sebesar Rp.426.153.200 ,00Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2017		Pengadaan 2018		Diserahkan 2018		Reklasifikasi AT		Sisa 2018	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)
		77	110.541.200,00	77	110.541.200,00				
		220	315.612.000,00	220	315.612.000,00				
Jumlah			426.153.200,00		426.153.200,00				

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban penyusutan aset tetap tahun 2018 adalah sebesar Rp 533.230.375,00 dengan rincian :

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp
451.538.352,00	
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp
79.205.773,00	
c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp
1.886.250,00	
d. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp
<u>600.000,00</u>	
Jumlah	Rp
533.230.375,00	

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2018 sebesar Rp. 0

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 sebesar Rp terdiri dari :

a. Penyisihan Piutang Pajak	Rp
b. Penyisihan Piutang Retribusi	Rp
c. Penyisihan Piutang BLUD	Rp
d. Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR	Rp
e. Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penuruna)	%
	Tahun 2018	Tahun 2017		
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	7.064.100,00	0	7.064.100,00	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	21.176.520,00		21.176.520,00	
JUMLAH				
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	(28.240.620,00)	0	(28.240.620,00)	

Penjelasan :

1. Pada tahun 2018 dilaksanakan penghapusan. Adapun barang yang berstatus rusak berat (RB) yang telah dihapus sebesar Rp. 114.207.610 dengan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/459 tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes. Sedangkan barang dengan kondisi tidak ditemukan (TD) telah dihapus sebesar Rp. 27.339.825,- dengan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/296 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah setelah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.
2. Barang-barang dengan kondisi rusak berat yang telah dihapus tersebut dijual dengan nilai buku Rp 114.207.610 dan penerimaan kas daerah atas penjualan sebesar Rp 1.200.000, sedangkan barang dengan kondisi Tidak Ditemukan (TD) telah dihapus dengan nilai buku Rp. 27.339.825,- Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai *) Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp 28.240.620
*)pilih salah satu

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017.

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.542.629.671,52 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp .6.198.083.338,49 ditambah Surplus-LO TA 2018 sebesar Rp.(13.671.888.808,00) dikurangi koreksi ekuitas TA 2018 sebesar Rp (35.645.120,00)

Rincian Koreksi Ekuitas sebagai berikut :

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Koreksi Nilai Kas		
Koreksi Nilai Piutang		
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Beban Dibayar di Muka		
Koreksi investasi		
Koreksi Nilai Tanah		
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		(902.679.795,00)
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan		(133.261.825,00)
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan		(9.900.000,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		474.628.440,97
Koreksi Nilai Aset Lainnya		(30.959.999,00)
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		
Koreksi Utang Belanja	(9.382.978,00)	
Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap	(71.575.143,00)	
Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	45.313.002,03	

(koreksi aset pada LPE hanya yang berkaitan dengan penurunan nilai aset tahun-tahun sebelumnya, sedangkan koreksi atas tahun ybs/th 2018 mempengaruhi Laporan-LO yaitu dicatat sebagai Pendapatan-LO/Beban)

Penjelasan :

1. Koreksi Nilai Kas, merupakan :

a.
b.
2. Koreksi Nilai Piutang, merupakan :

a.
b.
3. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :

- a.
- b.
- 4. Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
 - a.
 - b.
- 5. Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
- 6. Koreksi Nilai Investasi, merupakan :
 - a.
 - b.
- 7. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 8. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 9. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 10. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 11. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 12. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 13. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
 - b.
- 14. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
- 15. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :

- a.
- b.
16. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :

a.Koreksi kekurangan iuran JKM bulan Juli-desember 2017 Rp. 9.485.786,00

b. Koreksi saldo awal utang belanja upah tenaga kebersihan Rp.
(102.808,00)
17. Koreksi Mutasi asset tetap, merupakan :

a. Koreksi Mutasi Masuk mobil Avanza G 9510 JR Rp.
109.342.857,00

b. Koreksi Mutasi Keluar Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor Rp.
(165.978.000,00)

c. Koreksi Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan UPT Wanasari Rp. (
14.940.000,00)
18. Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :

a. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Rp.
4.922.739.418,00

b. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Rp.
(4.877.426.416,00)

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2018	Th. 2017
Aset Lancar	1.384.281.688,52	1,502,689,037,52
Aset Tetap	5.246.566.871,00	4,675,000,310,97
Aset Lainnya	9.000.000,00	28.240.621,00
Jumlah Aset	6.639.848.559,52	6,205,929,969,49
Kewajiban	97.218.888,00	7.846.631,00
Ekuitas	6.542.629.671,52	6,198,083.338,49
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	6.639.848.559,52	6,205,929,969,49

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset

lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2018	Th. 2017
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	1.384.281.688,52	1.502.689.037,52
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	1.384.281.688,52	1.502.689.037,52

1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Th. 2018	Th. 2017
Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Kas di JKN		
Kas di Bendahara FKTP		
Kas di Bendahara BOS		

Saldo Kas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp dan Saldo Kas tahun 2018 sebesar Rp terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp..... Kas tersebut merupakan :
a. ...
b. ...
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp Kas tersebut merupakan :
a. ...
b. ...

3. Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
Jumlah	:	Rp

4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD	:	Rp pada SD Negeri
- SMP	:	Rp pada SMP Negeri

2. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2018 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lain-lain sebesar Rp

Jenis Piutang	Nilai Piutang
1) Piutang Pajak Daerah	
2) Piutang Retribusi	
3) Bag. Lancar TP-TGR	
4) Piutang Lain-lain	
5) Piutang BLUD	
Jumlah	

1) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 adalah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah :	2018	2017
------------------------	------	------

	Rp	Rp
Piutang Pajak		
Piutang Pajak		
Jumlah		

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

Saldo Piutang Pajak Tahun 2018	Rp
<u>Penambahan :</u>	
a. Piutang atas transaksi tahun 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp
c. dst	Rp
<u>Pengurangan :</u>	
a. Setoran tahun 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp
c. dst	Rp
Saldo Piutang Pajak Tahun 2018	Rp

2) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	2018	2017
	Rp	Rp
Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi		
Jumlah		

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2017	Rp
<u>Penambahan :</u>	
a. Piutang baru atas transaksi tahun 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2017	Rp
c. dst	Rp

Pengurangan :

a. Setoran pada tahun 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp
c. dst	Rp
Saldo Piutang Retribusi Tahun 2018	Rp

3) Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Putang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR.

Saldo piutang dimaksud adalah Rp..... Rincian Bagian Lancar TP-TGR adalah sebagai berikut :

Nama	Saldo 2017	Mutasi 2018		Saldo 2018
	Rp	Tambah	Kurang	Rp
1.				
2.				
3.				
Jumlah				

Mutasi Piutang TP-TGR sebagai berikut :

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2017	Rp
<u>Penambahan :</u>	
a. Piutang baru penetapan th 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2017	Rp
c. dst	Rp
<u>Pengurangan :</u>	
a. Setoran tahun 2018	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2017	Rp
c. dst	Rp
Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2018	Rp

4) Piutang Lain-lain

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima. Saldo piutang

dimaksud adalah Rp..... Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2018	2017
			Rp	Rp
1.	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak			
2.	Piutang Kelebihan Pembayaran			
3.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan			
4.	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan			
	Dst			
	Jumlah			

Penjelasan :

1. Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan oleh
(nama rekanan)
2. Piutang Kelebihan Pembayaran merupakan piutang atas kelebihan pembayaran kepada (nama pihak ke-3)
3. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

4. Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan merupakan piutang atas denda keterlambatan pelaporan (nama laporan) yang harus diterima dari (nama pihak yang wajib melaporkan)

No	Uraian	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

5) Piutang BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD pada SKPD adalah sebagai berikut :

Piutang BLUD :	2018	2017
	Rp	Rp
1. Piutang		
2. Piutang		
3. Piutang		
Jumlah		

Penjelasan : (disesuaikan dengan kondisi SKPD, penjelasan ini dapat dibuat lebih terperinci dengan lampiran tabel)

1. Piutang sebesar Rp merupakan
2. Piutang sebesar Rp merupakan
3. Piutang sebesar Rp merupakan

6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2018 sebesar **minus** Rp..... dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Piutang	Nilai Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
1. Piutang Pajak Daerah		-
2. Piutang Retribusi		-
3. Bag. Lancar TP-TGR		-
4. Piutang Lain-lain		-
5. Piutang BLUD		-
Jumlah		-

Saldo masing-masing rekening Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
----------------------	---------------	--------------------

1. Piutang Pajak		-
2. Piutang Pajak		-
Jumlah		-

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Ret.		-
2. Piutang Ret.		-
Jumlah		-

Bagian Lancar TP-TGR (Nama Debitur)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.		-
2.		-
Jumlah		-
		-
Piutang Lain-lain	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah		-

3. Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Persediaan :	2018	2017
	Rp	Rp
1. Persediaan Bahan Pakai Habis	699.999,52	699.999,52
2. Persediaan Bahan Material	1.383.581.689,00	1.501.989.038,00
3. Persediaan Lainnya		
4. Persediaan Cetak dan Penggandaan		
5. Persediaan Makan Minum		
6. Persediaan Pakaian dan Atributnya		
7. Persediaan Pakaian Kerja		
8. Persediaan Pakaian Khusus		
9. Persediaan Barang Yang Akan Dijual		
10. Persediaan Barang BOS		
Jumlah	1.384.281.688,52	1.502.689.037,52

Mutasi persediaan selama tahun 2018 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Persediaan Bahan Pakai Habis		636.265.967,00	636.265.967,00	
Persediaan Bahan/ Material	1.501.989.038,00	4.995.074.422,00	5.113.481.771,00	1.383.581.689,00
Persediaan Lainnya		426.153.200,00	426.153.200,00	
Persediaan Cetak dan Penggandaan	699.999,52	162.386.700,00	162.386.700,00	699.999,52
Persediaan Makanan dan Minuman		1.133.159.500,00	1.133.159.500,00	
Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya		12.900.000,00	12.900.000,00	
Persediaan Pakaian Kerja				
Persediaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		90.040.000,00	90.040.000,00	
Persediaan Barang Untuk Dijual kepada Masy/Pihak Ke-3				
Persediaan Barang Dana BOS				
JUMLAH	1.502.689.037,52	7.455.979.789,00	7.574.387.138,00-	1.384.281.688,52

Penjelasan penambahan persediaan selama th 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	PENGADAAN TH 2018	REKLAS DARI PEMELIHARAAN TH 2018	REKLAS DARI B. MODAL TH 2018	MUTASI MASUK TH 2018	HIBAH MASUK TH 2018	HUTANG PERSEDIAAN	JUMLAH PENAMBAHAN
Persediaan Bahan Pakai Habis		636.265.967,00						636.265.967,00
Persediaan Bahan/ Material		216.959.900 ,00				4.778.114.552,00		4.995.074.422,00
Persediaan Barang Lainnya		426.153.200,00						426.153.200,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan		162.386.700 .00						162.386.700,00

Persediaan Makanan dan Minuman		1.133.159.500,0						1.133.159.500.00
Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya		12.900.000 ,00						12.900.000,00
Persediaan Pakaian Kerja								
Persediaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		90.040.000,00						90.040.000,00
Persediaan Barang Dijual kpd Masy/Pihak Ke-3								
Persediaan Barang Dana BOS								
JUMLAH		2.677.865.267,00				4.778.114.552,00		7.455.979.789,00

Penjelasan pengurangan persediaan selama th 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR TH 2018	HIBAH KELUAR TH 2018	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Persediaan Bahan Pakai Habis		636.265.967,00					636.265.967,00
Persediaan Bahan/ Material		5.113.481.771,00					5.113.481.771,00
Persediaan Barang Lainnya				426.153.200,00			426.153.200,00
Persediaan Cetak dan Penggandaan		162.386.700 ,00					163.386.700,00
Persediaan Makanan dan Minuman		1.133.159.500,00					1.133.159.500,00
Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya		12.900.000,00					12.900.000,00
Persediaan Pakaian Kerja							
Persediaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		90.040.000,00					90.040.000,00
Persediaan Barang							

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR TH 2018	HIBAH KELUAR TH 2018	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/- RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Untuk Dijual kepada Masy/Pihak Ke-3							
Persediaan Barang Dana BOS							
JUMLAH		7.148.233.938,00					7.574.387.138,00

Dari saldo tersebut tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Rekap barang Kadaluarsa dan Rusak sebagai berikut :

Barang Kadaluarsa/Usang

Persediaan :	Kadaluarsa	Usang
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetakan		
2. Obat-Obatan dan Alkes		
3. Bibit Tanaman/Ternak		
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga		
5. Persediaan Lainnya		
Jumlah		

Barang Rusak

Persediaan :	Saldo
	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetakan	
2. Obat-Obatan dan Alkes	
3. Bibit Tanaman/Ternak	
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	
5. Persediaan Lainnya	
Jumlah	

Dari saldo tersebut sebesar Rp..... merupakan barang-barang yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat namun masih berada pada SKPD Adapun rinciannya sebagaimana lampiran.

B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1 . Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh SKPD DP3KB Kab.Brebes per 31 Desember 2018 dan 2017. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. (5.486.853.934,00) dan Rp (4,922,739,418.03)dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	2018	2017
	Rp	Rp
a. Tanah	18,000,000.00	18,000,000.00
b. Peralatan dan Mesin	6.269.001.532,00	5,446,069,456.00
c. Gedung dan Bangunan	4.352.209.601,00	4,039,460,600.00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.725.000;00	37,725,000.00
e. Aset Tetap Lainnya	56,484,673.00	56,484,673.00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(5.486.853.934,00)	(4,922,739,418.03)
Jumlah Aset Tetap	5.246.566.871,00	4,675,000,310.97

Rincian Aset tetap sebagai berikut :

ASET TETAP :	Th. 2018	Th. 2017
Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00
Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00
Peralatan & Mesin	6.269.001.532,00	5,446,069,456.00
- Alat - alat Berat	38.320.000,00	38.320.000,00
- Alat -alat Angkutan	4.224.886.683,00	3.518.277.333,00
- Alat Bengkel		
- Alat Pertanian & Peternakan		
- Alat -alat Kantor & RT	1.592.242.331,00	1.504.119.605,00
- Alat Studio & Alat Komunikasi	405.522.518,00	377.322.518,00
- Alat Ukur		
- Alat - alat Kedokteran	8.030.000,00	8.030.000,00
- Alat Laboratorium		
- Alat Keamanan		
- Peralatan Rumah Tangga		
Gedung & Bangunan	4.352.209.600,00	4,039,460,600.00
- Bangunan Gedung	4.322.209.600,00	4.009.460.600,00
- Bangunan Monumen	30.000.000,00	30.000.000,00
Jalan,Irigasi & Jaringan	37.725.000,00	37,725,000.00
- Jalan & jembatan		
- Bangunan Air (Irigasi)		

- Instalasi	37.725.000	37,725,000.00
- Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	56.484.673,00	56,484,673.00
- Buku & Perpustakaan	3.494.673,00	3.494.673,00
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	52.990.000,00	52.990.000,00
- Hewan/Ternak & Tumbuhan		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Jumlah	10.733.420.805,00	9,597,739,729.00

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp..... dan Rp..... Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Kemajuan Fisik (%)	Nominal	Keterangan
1. Pekerjaan				
2. Pekerjaan				
Jumlah				

Penjelasan : *(apabila nihil tidak perlu diberi penjelasan)*

1. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
2. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
3. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp

Tabel Penambahan/Pengurangan Aset Tahun 2018

URAIAN	SALDO NERACA 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO NERACA 2018
TANAH	18.000.000,00			18.000.000,00
Jumlah	18.000.000,00			18.000.000,00
PERALATAN DAN MESIN				
a. Alat Besar	38.320.000,00			38.320.000,00

URAIAN	SALDO NERACA 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO NERACA 2018
b. Alat Angkutan	3.518.277.333,00	706.609.350,00		4.224.886.683,00
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	1.504.119.605,00	254.100.726,00	165.978.000,00	1.592.242.331,00
f. Alat Studio & Komunikasi	377.322.518,00	28.200.000,00		405.522.518,00
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran	8.030.000,00			8.030.000,00
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	5.446.069.456,00	988.910.076,00	165.978.000,00	6.269.001.532,00
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	4.009.460.600,00	333.499.000,00	20.750.000,00	4.322.209.600,00
b. Bangunan Monumen	30.000.000,00			30.000.000,00
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	4.039.460.600,00	333.499.000,00	20.750.000,00	4.352.209.600,00
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi	37.725.000,00			37.725.000,00
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	37.725.000,00			37.725.000,00
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku & Perpustakaan	3.494.673,00			3.494.673,00
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	52.990.000,00			52.990.000,00
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA	56.484.673,00			56.484.673,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	9.597.739.729,00	1.322.409.076,00	186.728.000,00	10.733.420.805,00

Tabel Penambahan

URAIAN	BERTAMBAH (Rp)			JUMLAH BERTAMBAH
	BELANJA MODAL 2018	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	
TANAH				-
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				

URAIAN	BERTAMBAH (Rp)			JUMLAH BERTAMBAH
	BELANJA MODAL 2018	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	
a. Alat Besar				
b. Alat Angkutan	259.979.250	191,350,000.00	255,280,100.00	706,609,350.00
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	254.100.726			254,100,726.00
f. Alat Studio & Komunikasi	28.200.000			28,200,000.00
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran				
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	542.279.976			988,910,076.00
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	333,499,000.00			333,499,000.00
b. Bangunan Monumen				
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	333,499,000.00			
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi				
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku & Perpustakaan				
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA				
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	875,778,976.00			1,322,409,076.00

Tabel Pengurangan

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBA H KEL UAR	PERSED IAAN	R. EXTRA COMP	RUSAK BERAT (RB)	TIDAK DITEMUKA N (TD)	KOR EKSI KUR ANG	JUMLAH BERKURANG
TANAH								
Jumlah								
PERALATAN DAN MESIN								
a. Alat Besar								
b. Alat Angkutan								
c. Alat Bengkel								
d. Alat Pertanian & Peternakan								
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	165,978,000.00							165,978,000.00
f. Alat Studio & Komunikasi								
g. Alat Ukur								
h. Alat Kedokteran								
i. Alat Laboratorium								
j. Alat Keamanan								
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	165,978,000.00							165,978,000.00
GEDUNG & BANGUNAN								
a. Bangunan Gedung	20,750,000.00							20,750,000.00
b. Bangunan Monumen								
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	20,750,000.00							20,750,000.00
JALAN, IRIGASI & JARINGAN								
a. Jalan & jembatan								
b. Bangunan Air (Irigasi)								
c. Instalasi								
d. Jaringan								
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN								
ASET TETAP LAINNYA								
a. Buku & Perpustakaan								
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan								
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan								

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBA H KEL UAR	PERSED IAAN	R. EXTRA COMP	RUSAK BERAT (RB)	TIDAK DITEMUKA N (TD)	KOR EKSI KUR ANG	JUMLAH BERKURANG
ASET TETAP LAINNYA								
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN								
Konstruksi Dalam Pengerjaan								
Jumlah	186,728,000.00							186,728,000.00

Penjelasan :
(Disesuaikan dengan kondisi SKPD)

Adapun mutasi aset tetap periode tahun 2018 berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

URAIAN		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset tetap lainnya	Konstruks i dalam Pengerjaa n	Jumlah
SALDO AWAL		18.000.000	5.446.069.456	4.039.460.600	37.725.000	56.484.673		9.597.739.729
BELANJA MODAL			542.279.976	333.499.000				875.778.976
TAMBAH	HIBAH MASUK	-	255.280.100	-	-	-	-	255.280.100
	MUTASI MASUK	-	191.350.000	-	-	-	-	191.350.000
	REKLAS DARI SESAMA AT	-	-	-	-	-	-	-
	KAPITALISASI DARI B. BARANG	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP YANG SUDAH SELESAI							
	KAPITALISASI DARI B.PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI BARANG DISERAHKAN	-	-	-	-	-	-	-
	HUTANG ASET TETAP	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
	KOREKSI	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset tetap lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	Jumlah
JUMLAH		-	988.910.076	333.499.000	-	-	-	1.322.409.076
KURANG	HIBAH KELUAR	-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI KELUAR	-	165.978.000	20.750.000	-	-	-	186.728.000
	REKLAS KE SESAMA AT	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B. PERSEDIAAN	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B.PERJLN DINAS	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B.PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP KE AT							
	TDK DIKAPITALISASI	-	-	-	-	-	-	-
	KOREKSI	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	165.978.000	20.750.000	-	-	-	186.728.000
SALDO AKHIR		18.000.000	6.269.001.532	4.352.209.600	37.725.000	56.484.673	-	10.733.420.805

Mutasi Aset Tetap terdiri dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Aset Tetap atas barang pengadaan tahun 2018.

Penambahan Aset Tetap terdiri atas:

- Penambahan aset dari belanja modal tahun 2018 Rp 875.778.976,00.;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja persediaan tahun 2018 Rp;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pemeliharaan tahun 2018 Rp;
- Penambahan aset dari KDP yang telah menjadi aset tetap Rp;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah Rp.255.280.100,00;
- Reklasifikasi dari aset lainnya Rp;
- Reklasifikasi dari barang yang diserahkan kepada pihak ke-3 Rp;
- Penerimaan aset dari SKPD lain/Unit Kerja Rp. 191.350.000
- dst.....

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

Pengurangan Aset Tetap terdiri atas:

- Tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (ekstrakomptabel) Rp;
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Rp;
- Hibah keluar kepada pihak ke-3 Rp;
- Mutasi ke SKPD lain/Unit Kerja Rp 186.728.000;
- dst

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2018 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018
TANAH				
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				
a. Alat Alat Besar Darat	4.553.532.746,00		4.553.532.746,28	0
a. Alat Alat Bantu	0	27.548.571,00	0	27.548.571,00
b. Alat Angkutan darat bermotor	0	3,589.872.551,00	0	3,589.872.551,00
c. Alat Bengkel	0			
d. Alat Pertanian & Peternakan	0			
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	0	1.218.611.405,00	0	1.218.611.405,00

URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018
f. Alat Studio & Komunikasi	0	250.724.712,00	0	250.724.712,00
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran	0	4.998.000.00	0	4.998.000.00 ,00
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	4,553,532,746.27	5.091.755.239,00	4,553,532,746.27	5.091.755.239,00
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	300.577.921,75	372.583.695,00,	306.387.921,75	366.773.696,00
b. Bangunan Monumen	0	7.200.000,00	0	7.200.000,00
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	300.577.921,75	379.783.695,00	306.387.921,75	373.973.695,00
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan	18,038,750.00	0	18,038,750.00	0
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi		19.925.000,00		19.925.000,00
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	18,038,750.00	19.925.000,00	18,038,750.00	19.925.000,00
ASET TETAP LAINNYA				
a. Aset Tetap Renovasi	50,590,000.00	0	50,590,000.00	0
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	1.200.000,00		1.200.000,00
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan	0	0	0	0
ASET TETAP LAINNYA	50,590,000.00	1.200.000,00	50,590,000.00	1.200.000,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	4,922,739,418.03	5.492.663.934,00	4,928.549.417 ,00	5.486.853.934,00

Penambahan Ak. Penyusutan Tahun 2018

URAIAN	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI MASUK	BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH PENAMBAHAN
TANAH				
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				

URAIAN	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI MASUK	BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH PENAMBAHAN
a. Alat Alat Bantu	22.162.857,00		5.385.714,00	27.548.571,00
b. Alat Angkutan Darat Bermotor	3.363.167.904,00	82.007.143,00	144.697.504,00	3.589.872.551,00
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	988.176.775,00		230.434.630,00	1.218.611.405,00
f. Alat Studio & Komunikasi	181.310.208,00		69.414.504,00	250.724.712,00
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran	3.392.000,00		1.606.000,00	4.998.000,00
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	4.558.209.744,00	82.007.143	451.538.352,00	5.091.755.239,00
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	293.377.922,00		79.205.773,00	372.583.695,00,
b. Bangunan Monumen	7.200.000,00			7.200.000,00
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	300.577.922,00		79.205.773,00	379.783.695,00
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi	18.038.750,00		1.886.250,00	19.925.000,00
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	18.038.750,00		1.886.250,00	19.925.000,00
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku & Perpustakaan				
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	600.000,00		600.000,00	1.200.000,00
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA	600.000,00		600.000,00	1.200.000,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	4.877.426.416,00	82,007,142.86	533.230.375,00	5.492.663.934,00

Pengurangan Ak. Penyusutan Tahun 2018

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUA R	KOREKSI SALDO AWAL	TIDAK DITEM UKAN (TD)	KOREK SI ASET KURA NG	KOREKSI KURANG (Ov)	JUMLAH PENGURANGAN
TANAH							
Jumlah							
PERALATAN DAN MESIN							

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUA R	KOREKSI SALDO AWAL	TIDAK DITEM UKAN (TD)	KOREK SI ASET KURA NG	KOREKSI KURANG (Ov)	JUMLAH PENGURANGAN
a. Alat Besar			4.553.532.746,28			0	4.553.532.746,28
b. Alat Angkutan							
c. Alat Bengkel							
d. Alat Pertanian & Peternakan							
e. Alat Kantor & Rumah Tangga							
f. Alat Studio & Komunikasi							
g. Alat Ukur							
h. Alat Kedokteran							
i. Alat Laboratorium							
j. Alat Keamanan							
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN			4.553.532.746,28			0	4.553.532.746,28
GEDUNG & BANGUNAN							
a. Bangunan Gedung	5.810.000,00		300.577.921,75			0	306.387.921,75
b. Bangunan Monumen							
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	5.810.000,00		300.577.921,75			0	306.387.921,75
JALAN, IRIGASI & JARINGAN							
a. Jalan & jembatan			18.038.750,00				18.038.750
b. Bangunan Air (Irigasi)							
c. Instalasi							
d. Jaringan							
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN			18.038.750,00				18.038.750
ASET TETAP LAINNYA							
a. Aset Tetap Renovasi			50.590.000,00			0	50.590.000,00
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan							
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan							
ASET TETAP LAINNYA			50.590.000,00			0	50.590.000,00
KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN							
Konstruksi Dalam Pengerjaan							
umlah	5.810.000,00		4.922.739.418,00				4.928.549.417 ,00

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.000.000 dan Rp 254.854.251, dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2018
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud		9.000.000,00		9.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Aset Lain-lain	141.547.435,00		141.547.435,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	113.306.815,00		113.306.815,00	
Jumlah	254.854.251,00	9.000.000,00	254.854.250,00	9.000.000,00

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp 9.000.000 dan 0

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp 9.000.000 merupakan aset yang berupa software/ aplikasi komputer.

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a. Aplikasi Data PUS Rp. 9.000.000
 - b.
 - c.
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp terdiri atas :

- Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2017 sebesar
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebesar Rp
- Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang mempengaruhi Ekuitas sebesar Rp

3. Aset Lain-lain Rp terdiri atas :
- a. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2018
Jumlah				

- Penambahan merupakan DE 2018 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya Rp
 - Pengurangan Saldo DE 2017 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan Rp
 - Pengurangan Saldo DE 2017 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp
- b. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Hibah Keluar belum Dihapuskan

URAIAN	JML BRG	NOMINAL (Rp)
TANAH		
Jumlah		
PERALATAN DAN MESIN		
a. Alat Besar		
b. Alat Angkutan		
c. Alat Bengkel		
d. Alat Pertanian & Peternakan		
e. Alat Kantor & Rumah Tangga		
f. Alat Studio & Komunikasi		
g. Alat Ukur		
h. Alat Kedokteran		
i. Alat Laboratorium		
j. Alat Keamanan		
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG & BANGUNAN		
a. Bangunan Gedung		
b. Bangunan Monumen		
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
a. Jalan & jembatan		
b. Bangunan Air (Irigasi)		
c. Instalasi		
d. Jaringan		
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		

URAIAN	JML BRG	NOMINAL (Rp)
a. Buku & Perpustakaan		
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan		
ASET TETAP LAINNYA		
KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Jumlah		

- c. Barang berlebih yang belum dinilai sebesar Rp
- d. dst

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan sebagai berikut :

Tabel Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD/Hibah Keluar

URAIAN	SALDO TH 2017	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (RB)	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (TD)	MUTASI AK. PENYUSUTAN HIBAH KELUAR	SALDO TH 2018
TANAH					
Jumlah					
PERALATAN DAN MESIN					
a. Alat Besar					
b. Alat Angkutan					
c. Alat Bengkel					
d. Alat Pertanian & Peternakan					
e. Alat Kantor & Rumah Tangga					
f. Alat Studio & Komunikasi					
g. Alat Ukur					
h. Alat Kedokteran					
i. Alat Laboratorium					
j. Alat Keamanan					
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN					
GEDUNG & BANGUNAN					
a. Bangunan Gedung					
b. Bangunan Monumen					
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN					
JALAN, IRIGASI & JARINGAN					
a. Jalan & jembatan					
b. Bangunan Air (Irigasi)					
c. Instalasi					
d. Jaringan					

URAIAN	SALDO TH 2017	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (RB)	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (TD)	MUTASI AK. PENYUSUTAN HIBAH KELUAR	SALDO TH 2018
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN					
ASET TETAP LAINNYA					
a. Buku & Perpustakaan					
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
c. Hewan/Temak & Tumbuhan					
ASET TETAP LAINNYA					
KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah					

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 97.218.888,00 dan Rp. 7.846.631,00 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Th. 2018	Th. 2017
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Uang Muka dari Kas Daerah		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	97.218.888,00	7.846.631,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
RK-PPKD		
Jumlah	97.218.888,00	7.846.631,00

1)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 Rp..... Saldo Utang PFK per 31 Desember 2018 merupakan :

1. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara), berupa Pajak sebesar Rp , Pajak sebesar Rp dst...
2. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rp.....
3. Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD)

2) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 nihil.

3) *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2018 Rp

Pendapatan Diterima Dimuka :	2018	2017
	Rp	Rp
a.		
b.		
Jumlah		

4) *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 nihil.

5) *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2018 sebesar Rp 85.200.000, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2017	TAMBAH	KURANG	SALDO 2018
Belanja Pegawai	1.522.808,00	94,582,978,00	10,905,786,00	85,200,000,00
Belanja Barang/Persediaan	6.323.823,00	12.018.888,00	6.323.823,00	12.018.888,00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa				
Belanja Perjalanan Dinas				
Jumlah	1.522.808,00	94,582,978,00	10,905,786,00	85,200,000,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan Utang kekurangan iuran JKM bulan Juli - desember 2017 sebesar Rp 9.485.786,00, Koreksi saldo awal utang belanja upah tenaga kebersihan sebesar Rp. 102.808,00 dan TPP bulan desember 2018 yang belum dibayar sebesar Rp. 85.200.000,00

b. Utang Belanja Barang merupakan Utang atas tagihan air PDAM, Listrik, Internet, Telp Tahun 2018 yang belum dibayarkan . sebesar Rp 12.018.888,00Utang Belanja Pemeliharaan merupakan Utang atas Pemeliharaan sebesar Rp

- c. Utang Belanja Jasa merupakan Utang atas belanja sebesar Rp
.....
- d. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp 9.485.786,00 kekurangan iuran JKM bulan Juli - desember 2017, koreksi atas saldo awal utang belanja upah tenaga kebersihan sebesar Rp 102.808,00 dan pembayaran Utang belanja upah tenaga kebersihan sebesar Rp. 1.522.808,00
- b. Utang Belanja Barang merupakan pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp 6.323.823,00, koreksi atas utang tahun 2017 sebesar Rp 0
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp....., koreksi atas utang tahun 2017 sebesar Rp
.....
- d. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp....., koreksi atas utang tahun 2017 sebesar Rp
.....
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan pembayaran utang tahun 2017 sebesar Rp....., koreksi atas utang tahun 2017 sebesar Rp
.....

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2018 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp dan Rp..... dengan rician sebagai berikut :

Utang Jangka Pendek Lainnya :	2018	2017
	Rp	Rp
a.		
b.		
c.		
d.		
Jumlah		

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.Hutang sebesar Rp merupakan
- 2.Hutang sebesar Rp merupakan
- 3.Hutang Putus Kontrak atas pekerjaan tahun sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1		
2		
3		
4		
	TOTAL	

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(14.052.080.261,00)

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca DP3KB per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.7.106.744.188,97 Perubahan atas ekuitas tahun 2018 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2017 :	NILAI (Rp)	
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 (restatement)	6.198.083.338,49	
Surplus/(Defisit)-LO	(13.671.888.808,00)	
Koreksi Ekuitas	(35.645.120,00)	
Kewajiban untuk dikonsoldasikan	14.052.080.261,00	
Jumlah	6.542.629.671,52	

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp (14.052.080.261,00)Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (13.671.888.808,00) sehingga memiliki perbedaan sebesar -380.191.453 Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Hubungan LRA-LO Tahun 2018

No	Uraian	Rp
A	Surplus/(Defisit) LRA	(14.052.080.261,00)
	Penambahan	
1	Realisasi Belanja Modal tahun 2018	884.778.976,00
2	Pembayaran utang belanja jasa tahun 2017	7.743.823,00
3	Penerimaan Hibah Alkon dari Provinsi	4.778.114.522,00
4	Mutasi Kendaraan Dinas dari kementrian PPA	255.280.100,00
5	Pembayaran utang belanja pegawai tahun 2017	9.485.786,00
6	Saldo akhir persediaan tahun 2018	1.383.581.689,00
7	Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	426.153.200,00
B	Jumlah Penambahan	7.745.138.096,00
	Pengurangan	
1	Utang Belanja Pegawai 2018 yang belum dibayar	85.200.000,00
2	Saldo Awal tahun 2018	1.501.989.038,00
3	Penerimaan Hibah Alkon dari Provinsi	4.778.114.522,00
4	Utang Jasa tahun 2018	12.018.888,00
5	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	7.064.100,00
7	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	21.176.520,00
8	Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	426.153.200,00
9	Akumulasi Penyusutan	533.230.375,00
C	Jumlah Pengurangan	7.364.946.643
D	Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)	(13.671.888.808)

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Realisasi Belanja Modal

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2018 sebesar 884.778.976 mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan

pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

(uraian no 2 dst adalah CONTOH....sebaiknya dikembangkan sesuai uraian pada Jurnal Penyesuaian/Koreksi yang mempengaruhi beban dan pendapatan)

2. Kapitalisasi Aset Tetap/Tak berwujud dari Belanja Non Modal

Total nilai kapitalisasi yang menambah nilai aset tetap tahun 2018 adalah sebesar Rp Ketika nilai aset tetap bertambah akibat dari pengadaan yang menggunakan pos belanja non modal, maka pada Laporan Operasional tetap tidak akan diakui sebagai penambah beban, namun tetap akan menambah nilai Aset Tetap di Neraca. Adapun rinciannya :

No	Jenis Belanja	Nilai
1	Belanja Pemeliharaan	
2	Belanja Jasa	
3	Belanja Barang/Persediaan	
	Jumlah	

3. Penerimaan Hibah Berupa Aset Tetap

Penerimaan hibah berupa barang kendaraan bermotor dari kementerian PPA sebesar 255.280.100 dicatat sebagai penambah nilai aset tetap dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

4. Penerimaan Hibah Berupa Persediaan

Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesar 4.778.114.522 dicatat sebagai penambah nilai aset lancar dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

5. Mutasi Piutang Tahun 2018

Mutasi piutang tahun berkenaan sebesar Rp merupakan nilai kenaikan piutang tahun 2018 dibandingkan dengan nilai piutang tahun sebelumnya. Nilai ini akan menambah pendapatan LO namun tidak akan mempengaruhi nilai pendapatan di LRA karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara kedua Laporan tersebut. Adapun mutasi dari piutang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penambahan Piutang

Pendapatan Asli Daerah

Rp

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp
Pendapatan Transfer Rp

Pengurangan Piutang

Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp)
Pendapatan Transfer (Rp)
Jumlah Rp

6. Pendapatan Diterima Di Muka

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

7. Surplus atas Penjualan Aset Tetap

Surplus atas Penjualan Aset Tetap sebagai berikut :

- a. Penjualan Peralatan Mesin = Rp.....
- b. Penjualan Gedung dan Bangunan = Rp.....
- c. Penjualan Jalan, Irigasi, Jaringan = Rp.....
- d. Penjualan Aset Lainnya = Rp.....

8. Transfer Pemerintah Pusat Kurang Bayar

Merupakan Kewajiban Pemerintah kepada Pemkab Brebes yang masih belum dibayar, rincian sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

9. Koreksi Harga, merupakan koreksi harga atas transaksi tahun 2018 sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

10. Pembayaran kekurangan iuran JKM bulan Juli -Desember 2017 yang telah dibayarkan di tahun 2018 sebesar 9.485.786

11. Saldo Akhir Persediaan tahun 2018 sebesar Rp. 1.383.581.689

12. Pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2017 yang dibayar di tahun 2018 sebesar Rp. 7.743.823

(d disesuaikan dengan kondisi SKPD)

(uraian no 1 dst adalah CONTOH....sebaiknya dikembangkan sesuai uraian pada KK HUB LRA-LO)

Pengurangan :

1. Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan tahun sebelumnya
- Pada akhir tahun 2017 terdapat nilai kas dibendahara penerimaan senilai Rp..... dan disetorkan kepada Kas Daerah pada tahun 2018.
2. Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2018
- Mutasi Persediaan tahun 2018 adalah Saldo Persediaan tahun 2018 dikurangi Saldo Persediaan tahun 2017.
3. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi
- Pada tahun 2018 terdapat ketidaksesuaian antara rekening belanja modal dengan pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut terjadi pada beberapa SKPD dikarenakan pelaksanaan anggaran belanja modal tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, sehingga akan menambah beban operasional tanpa menambah nilai aset tetap.
- Adapun nilai non kapitalisasi atas belanja modal adalah sebesar Rp yang dapat dirinci sebagai berikut:
- Menambah Beban Persediaan sebesar Rp.....

- Menambah Beban Pemeliharaan sebesar Rp.....

- Menambah saldo persediaan sebesar Rp.....

- dst
4. Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018.
- Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO.
- Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus/(defisit) LRA.
5. Perbedaan pembebanan belanja dan beban dibayar dimuka
- Pada LO tahun 2018 disajikan pos beban dibayar di muka yang merupakan bagian beban tahun 2018.
- Sedangkan di LRA dicatat sebesar nilai kas yang dibayarkan, sehingga terjadi selisih nilai antara keduanya sebesar Rp..... Adapun Belanja tahun 2018 yang diakui sebagai Beban dan Beban Dibayar Di Muka adalah :

No	Jenis Belanja	Belanja (LRA) th 2018	Beban th 2018	Beban Dibayar Di Muka
1	Belanja			
2	Belanja			

3	Belanja			
	Jumlah			

6. Defisit Penghapusan Aset Tetap

Defisit penghapusan aset tetap diukur berdasarkan kerugian akibat dilaksanakannya penghapusan aset tetap. Apabila penghapusan suatu aset tetap yang masih memiliki nilai ekonomis, maka surplus/defisit penghapusan aset tetap disajikan sebesar selisih antara nilai jual dengan nilai buku aset tersebut. Pos ini hanya disajikan dalam Laporan Operasional dan tidak disajikan dalam LRA.

7. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018 sebesar Rp.....

Pada Tahun 2018, nilai pendapatan diterima dimuka merupakan salah satu penyebab selisih antara surplus/(defisit) LRA dengan surplus/(defisit) LO. Nilai di LRA diakui berdasarkan kas yang diterima pada satu periode pelaporan, sedangkan di LO diakui ketika munculnya hak atas pendapatan pada tahun pelaporan.

8. Mutasi Utang Tahun 2018 sebesar Rp.....

Kenaikan/penurunan utang belanja/utang jangka pendek juga menjadi pembeda antara LRA dan LO. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan nilai utang sebesar Rp..... sehingga nilai beban yang disajikan dalam LO menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan nilai belanja di LRA. Sedangkan nilai penurunan atas utang adalah sebesar Rp

9. Koreksi Harga merupakan

(.....dst..... dikembangkan sendiri.....).

10. Utang Belanja Pegawai 2018 yang belum dibayar Sebesar Rp. 85.200.000

11. Utang Belanja Jasa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 12.018.888

12. Penerimaan Hibah dari Provinsi Rp. 4.778.114.522

13. Saldo Persediaan awal tahun 2018 sebesar Rp. 1.501.989.038,52

14. Selisih harga perolehan dengan Akumulasi penyusutan atas penghapusan barang TD sebesar Rp. 21.176.520

15. Selisih harga perolehan dengan Akumulasi penyusutan atas penjualan barang RB sebesar Rp. 7.064.100

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan piutang tahun 2018

Rp

Dst ...

Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya

(Rp)

Dst ...

Jumlah

Rp

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2018 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pajak Hotel		
2	Pajak Restoran		
3	Pajak Hiburan		
4	Pajak Reklame		
5	PPJ PLN		
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Air Tanah		
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan		
9	Pajak Bumi dan Bangunan		
JUMLAH			

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan piutang tahun 2018 :

- Piutang	Rp
- Piutang	Rp
Jumlah Penambahan	Rp
- Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sblmnya	Rp
- Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka	Rp
Dst	
Jumlah Pengurangan	Rp
Jumlah	Rp

Pengurangan atas pendapatan diterima di muka adalah pengurangan atas pendapatan yang telah disetorkan atasuntuk jangka waktu tahun terhitung mulai sampai dengan

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih sebesar antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO dengan LRA merupakan pembayaran atasdan telah diakui sebagai pendapatan LO pada tahun

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih sebesar Rp antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

Penambahan atas piutang..... tahun 2018	Rp
dst	

Pengurangan :

Pengurangan atas pembayaran piutang (Rp)

Pengurangan atas piutang TGR (Rp)

Pengurangan atas denda kegiatan tahun (Rp)

dst

B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar
Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA
sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan
pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan
pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp 5.033.394.622

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
5.033.394.622		5.033.394.622

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

Dropping persediaan dari Provinsi	Rp 4.778.114.522
Hibah aset tetap dari Kementrian PPPA	Rp 255.280.100
Penambahan dari pihak ketiga	Rp

Pengurangan	(Rp.....)
Jumlah	Rp 5.033.394.622

2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan	Rp
Pengurangan	(Rp)
Jumlah	Rp

D. SURPLUS NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp..... merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
Jumlah		

2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp..... dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
Jumlah		

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
(4.178.266.745)	(4.102.552.531)	(75.714.214)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	(4.102.552.531)
	Penambahan :	

	Pembayaran Utang iuran JKM bulan Juli - desember 2017	9.485.786,00
	Pengurangan :	
	- Utang Upah Pungut th 2017 yang dibayar pada tahun 2018	
	- Utang TPP th 2018 yang dibayar pada th 2019	85.200.000
	Beban Pegawai LO	(4.178.266.745)

2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp (5.434.027.311,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	(7.148.233.938,00)	(2.206.961.067)	(4,941.272.871,00)
2	Beban/Belanja Jasa	(5.223.583.883 ,00)	(5,264.059.818,00)	40.475.935,00
3	Beban/Belanja sewa	(125.275.000,00)	(125.275.000,00)	
4	Beban/Belanja perjalanan dinas	(949.165.072,00)	(949.165.072,00)	
5	Beban/Belanja Pemeliharaan	(93.134.597 ,00)	(93.134.597 ,00)	
6	Beban/Belanja Hibah	(426.153.200)		(426.153.200,00)
7	Beban/Belanja barang yang Akan diserahkan kepada Pihak ke Tiga		(426.153.200,00)	426.153.200,00
8	Beban/Penyusutan dan Amortisasi	533.230.375,00		(533.230.375,00)
Jumlah		18.677.042.810,00	9.064.748.754	(5.434.027.311,00)

1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp 4,941.272.871 terdiri atas :

Penambahan :

Pengadaan barang Persediaan yang belum terbayar	Rp
Belanja Modal yang menambah nilai persediaan	Rp
Persediaan dari Hibah Pihak III	Rp
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya	Rp
Saldo Akhir persediaan Tahun 2018	Rp .1.383.581.689

Pengurangan :

Pembayaran utang persediaan tahun sebelumnya	Rp
Belanja persediaan yang di kapitalisasi ke Aset tetap	Rp
Mutasi Tambah Nilai Persediaan tahun sebelumnya	Rp
Penerimaan Hibah Alkon dari Provinsi	Rp .4.778.114.522
Saldo Awal persediaan Tahun 2018	Rp .1.501.989.038
Reklasifikasi Beban Hadiah dari kelompok Beban Jasa ke Beban Persediaan	Rp . 44.751.000

Jumlah **Rp . 4,941.272.871**

2) Selisih antara beban jasa di LO dengan Belanja Jasa di LRA senilai Rp. 40.475.935 terdiri atas :

Penambahan :

- B. Modal yang tidak dikapitalisasi direklasifikasi ke B. Jasa	Rp
- Beban Barang BOS	Rp
- Beban yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun	Rp
- Perbedaan Pengakuan antara LO dan LRA	Rp
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp
- Reklasifikasi Beban Hadiah dari kelompok Beban Jasa ke Beban Persediaan	Rp .44.751.000,00
- Beban Persediaan	Rp
- Pembayaran Utang Belanja Jasa Tahun 2017	Rp 7.743.823,00

Pengurangan

- Belanja Jasa yang di Kapitalisasi ke Aset Tetap	(Rp
- Pembayaran utang jasa tahun sebelumnya	
Utang Belanja Jasa Tahun 2018 yang belum dibayar	Rp.12.018.888,00
Jumlah	Rp 40.475.935,00

3) Selisih antara beban sewa-LO dengan belanja Sewa-LRA senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan tambahan belanja Non APBD yaitu

4) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan

5) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA
senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

terdiri atas :

Penambahan :

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp
Dst

Pengurangan :

- Belanja Pemeliharaan yang di Kapitalisasi ke aset Tetap (Rp)
- Belanja pemeliharaan yang menambah saldo persediaan (Rp)
- Reklasifikasi ke Beban Jasa (Rp)
Dst ...
Jumlah Rp

6) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp terdiri dari :

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Penambahan :

- Beban yang belum terbayar sampai akhir tahun Rp
- Belanja Non APBD dari Rp
- Reklasifikasi dari beban barang dan jasa lainnya Rp
Dst ...

Pengurangan :

- Pembayaran utang tahun sebelumnya Rp
Dst ...
Jumlah Rp

7) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai Rp..... terdiri dari :

- Reklasifikasi dari ke Beban Rp

- Reklasifikasi dari ke Beban
Dst
Jumlah
Rp
Rp

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp 426.153.200

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
426.153.200		426.153.200

Selisih tersebut merupakan beban hibah berupa barang yang diberikan untuk masyarakat/PPKBD Kab. Brebes , dimana di LRA Accrual masuk ke Belanja Barang dan Jasa.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 533.230.375,00

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp.....

8. Belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp....., namun tidak dicatat pada Laporan Operasional.
9. Belanja Tak Terduga

3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp.....

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp. 7.064.100,00

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp. 21.176.520,00 yang merupakan defisit karena perhitungan selisih akumulasi Penghapusan Aset Tetap atas penghapusan barang TD tahun 2018

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1 UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, Keududukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang dipimpin oleh seseorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah membantu Bupati Brebes dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

4.1.2 VISI DAN MISI SKPD

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2022, sebagai berikut :

Visi :

“Seluruh Keluarga ikut KB serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat melindungi perempuan dan anak menuju masyarakat sejahtera”.

Misi :

- a. Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Menata kembali pengelolaan program KB untuk menurunkan total fertility rate
- c. Memperkuat sumber daya manusia (SDM) operasional program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan KB & KR
- f. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang program KB, PP dan PA serta PKBR
- g. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan
- h. Mengembangkan system informasi dan manajemen program KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan informasi data mikro untuk kepentingan pembangunan

- i. Mewujudkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga berencana sehingga terbentuk keluarga kecil bahagia sejahtera
- j. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam program keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.1.3 ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah sebagai berikut :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) membawahi :

1. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Program dan Keuangan
2. Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kasi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
 - b. Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - b. Kasi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kasi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. Ka. UPT DP3KB Kecamatan (Eselon IV.a)

4.1.4 PERSONALIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki 109 personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 8 (delapan) orang Kasubag/Kasubid, 14 (empat belas) orang Kepala UPT DP3KB Kecamatan 50 (Lima Puluhan) orang Penyuluh KB, 17 (Tujuh Belas) orang staf di PNS, 0 orang tenaga honorer, dan 16 (Enam Belas) orang tenaga kontrak.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2018. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

dr. SRI GUNADI PARWOKO, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199010 1 002